



SABET PELAYANAN PUBLIK TERBAIK SE-INDONESIA

Menpan RB Tunjuk Yogya Jadi Percontohan

YOGYA (KR) - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menetapkan Kota Yogya sebagai percontohan bagi daerah lain dalam hal pelayanan publik. Hal ini seiring hasil penilaiannya yang menempatkan Pemkot Yogya sebagai kota terbaik se-Indonesia dalam hal pelayanan publik.

Hal tersebut diungkapkan Asman Abnur di sela pemberian penghargaan bidang pelayanan publik di Ruang Serbaguna Kementerian PAN RB Jakarta Selatan, Kamis (2/3). "Kami tuangkan dalam surat keputusan Nomor 191 Tahun 2016 untuk menetapkan Yogya sebagai role model penyelenggaraan pelayanan publik," ungkapnya.

Penghargaan di bidang pelayanan publik tersebut juga baru pertama kali ini dilakukan Kemenpan RB. Sedangkan dari Pemkot Yogya, penghargaan diterima oleh Sekda Kota Yogya Dra RR Titik Sulastri.

Asman Abnur menambahkan, penilaian untuk menetapkan Kota Yogya sebagai kota dengan pelayanan publik terbaik, dilakukan secara komprehensif. Mulai dari standar pelayanan yang ditetapkan, prosedurnya menyulitkan atau memudahkan serta melakukan survei kepuasan masyarakat. "Dari situ masyarakat memberikan penilaian pada sebuah unit pelayanan, dan menjadi bahan pertimbangan bagi kami. Harapan kami, daerah lain bisa mencontoh Yogya dalam pelayanan publik," tandasnya.

Sementara Sekda Kota Yogya Dra RR Titik Sulastri mengungkapkan, prestasi tersebut merupakan hasil kerja sama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan seluruh masyarakat Kota Yogya. Selain memberikan kepercayaan diri atas kinerja Pemkot, hasil penilaian Kemenpan RB itu juga akan dijadikan tantangan agar dapat meningkatkan kualitas serta mempertahankannya untuk masyarakat.

"Justru kami apresiasi kepada masyarakat Kota Yogya yang telah mendukung dengan baik program dari pemerintah. Setiap masukan yang disampaikan juga menjadi bagian untuk perbaikan," tandasnya.

Sedangkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogya Hery Karya-wan sebelumnya mengungkapkan, aspek perizinan selama ini menjadi tolok ukur utama dalam pelayanan publik. Dari sisi prosedur, pihaknya selalu berupaya agar mekanismenya memudahkan masyarakat. Begitu pula dari sisi waktu dan biaya, setiap akses perizinan sudah diberikan kepastian.

"Prosedur yang terlalu panjang, kami upayakan dipangkas tanpa melanggar aturan. Termasuk, sekarang sedang kami kaji supaya izin gangguan dapat berlaku seterusnya selama jenis usaha dan lokasinya tidak berubah. Jadi pemilik usaha tidak perlu repot melakukan perpanjang-an," urai Hery. (Dhi) -k

Tidak Lanjut



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan 2. RSUD (RS Jogja) 3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005